



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SATYAWAN PUDYATMOKO
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 840723

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.103.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/150 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HADIAH Rp. 1.400.000.000
2. Tanah Seluas 1899 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 1337 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 323 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 323.000.000
5. Tanah Seluas 905 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 905.000.000
6. Tanah Seluas 1955 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 2083 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 7150 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 132.500.000

1. MOBIL, TOYOTA YARRIS Tahun 2018, HADIAH Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000



3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000

| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 277.500.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 131.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 3.644.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 61.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 3.583.000.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.